

**SINERGI PEMERINTAH DAERAH DENGAN PT. ADARO INDONESIA DALAM
PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
DI KABUPATEN BARITO TIMUR**

***LOCAL GOVERNMENT SYNERGY WITH PT. ADARO INDONESIA IN THE
IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
IN EAST BARITO REGENCY***

Kwartypatricia¹⁾, Dwi Listya²⁾

**Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat
Email:kwarty.patricia@gmail.com**

ABSTRAK

Program CSR dengan skema sinergisitas pemerintah swasta dimana pelaksanaan kerjasama pemerintah swasta dapat dalam pembangunan infrastruktur. seperti sinergitas yang baik antara Pemerintah Daerah dan PT. Adaro Indonesia dengan pihak pemerintah Daerah Barito Timur mengenai pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan. Namun isu perluasan lahan yang berbenturan dengan lahan masyarakat, issue lingkungan (pencemaran) dan sosial ekonomi dan aspek lingkungan sejumlah pengaduan masyarakat akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup oleh aktivitas PT. Adaro Indonesia tetap terjadi, seperti beberapa kali terjadi kasus kematian ikan dalam jumlah besar milik masyarakat masih menjadi fenomena masalah sinergi tersebut.

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis masalah Sinergi Pemerintah Daerah Dengan PT. Adaro Indonesia Dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Di Kabupaten Barito Timur ini, maka penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur sebaiknya menerbitkan suatu tingkat kabupaten yang mewajibkan perusahaan- perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Barito Timur untuk mengkonsultasikan rencana program program CSR di Kabupaten Barito Timur. PT. Adaro Indonesia perlu mendorong dibentuknya sebuah forum CSR di tingkat kabupaten yang bisa memfasilitasi perusahaan dalam melakukan konsultasi rencana program CSR di Kabupaten Barito Timur.

Kata Kunci: Sinergi, CSR.

ABSTRACT

CSR program with a public-private synergy scheme where the implementation of public-private cooperation can be in infrastructure development. such as the good synergy between the Regional Government and PT. Adaro Indonesia with the East Barito Regional government regarding economic development, social development, and environmental protection. However, expand the land that is in conflict with community land, environmental and socio-economic issues and environmental aspects of public complaints due to pollution and/or environmental destruction by the activities of PT. Adaro Indonesia still occurs, such as several cases of deaths from being fish in large numbers belonging to the community, the phenomenon of the synergy problem is still happening.

To describe and analyze the problem of Synergy between Local Government and Pt. Adaro Indonesia in the Implementation of Corporate Socia Responsibility in East Barito. Regency, this study uses a

qualitative research design with a descriptive approach with data collection techniques carried out by observation, interviews, and documentation.

For this reason, the Regional Government of East Barito Regency should issue a special policy (perda/perbup/Regent's Decree, etc.) East Barito. PT. Adaro Indonesia needs to encourage the establishment of a CSR forum at the district level that can facilitate companies in consulting on CSR program plans in East Barito Regency

Keywords: *synergy, CSR.*

PENDAHULUAN

Kemunculan Industri bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selain untuk menyediakan lapangan pekerjaan, industri juga mendatangkan keuntungan materiil bagi siapa pun yang berhasil menggerakkan dan memanfaatkannya. Adanya industri membawa perubahan yang bersifat fisik berupa dibangunnya jalan dan infrastruktur untuk memudahkan transportasi pengangkutan bahan baku maupun pengangkutan hasil industri, penyerapan tenaga kerja lokal, serta kontribusi industri tersebut kepada masyarakat daerah disekitar industri, sekaligus membantu pemerintah daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat.

Secara prinsip perusahaan didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Usaha pokok dari sebuah perusahaan adalah kegiatan yang menghasilkan produk berupa barang dan jasa. Garis besar sebuah perusahaan adalah mendapatkan keuntungan ekonomi secara maksimal dan mencegah timbulnya kerugian (Busyra Azheri, 2012:2).

Menurut Busyra Azheri (2012:2) bahwa hal ini dikarenakan kultur perusahaan yang didominasi cara berpikir dan perilaku ekonomi yang hanya berorientasi pada keuntungan (*profit orientate*), sehingga terdapat pengakuan yang semakin besar akan tantangan pengaturan perilaku perusahaan disaat globalisasi ini salah satunya adalah program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dijalankan oleh perusahaan besar di daerah.

Dimana kemampuan pemerintah untuk membangun daerah dengan mempergunakan sumber keuangan dari bantuan pemerintah pusat atau pendapatan daerah sangatlah terbatas, untuk itulah upaya pemerintah daerah melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien mencari sumber-sumber fungsinya pendanaan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

Pemerintah menerapkan kebijakan bagi keterlibatan swasta dalam pembangunan melalui model kerjasama pemerintah swasta atau anggaran pemerintah untuk pembiayaan pembangunan, sehingga pemerintah dapat mengalokasikan anggarannya untuk infrastruktur lainnya, termasuk pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan pihak swasta seperti PT. Adaro Indonesia yang bergerak dalam usaha pertambangan.

Guna menjamin sinergitas yang baik antara Pemerintah Daerah dan PT. Adaro Indonesia maka pihak pemerintah Daerah Barito Timur dapat melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak perusahaan guna menyelesaikan berbagai permasalahan baik dalam aspek ekonomi sosial dan lingkungan dalam upaya menunjang program CSR di Kabupaten Barito Timur sebagaimana pendapat Sali Susiana, (2015) bahwa Program CSR tidak hanya berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas dari itu, program CSR mencakup tiga lingkup kebijakan yakni pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan, terutama relasi antara aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi dalam kerangka program CSR yang dipraktikkan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis sinergitas Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur dan PT. Adaro Indonesia dalam pelaksanaan program CSR, dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sinergitas Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur dan PT. Adaro Indonesia dalam pelaksanaan program CSR.

Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi,

pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ani Sri Rahayu, 2017:1).

Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya. kabupaten, dan daerah kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya kabupaten, dan daerah kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak untuk menempatkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (Ani Sri Rahayu, 2017:2).

Pemerintahan daerah dalam pelaksanaan fungsi dan urusannya memiliki beberapa asas. Terdapat empat asas utama pemerintah daerah yang berkaitan dengan kewenangan otonomi daerah, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Asas Senralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan berada di pemerintah pusat.
2. Asas Desentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada daerah otonom.
3. Asas Dekonsentrasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan instansi serta perangkat daerah yang membantu kerja pemerintah daerah.
4. Asas Tugas Pembantuan, asas yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memberi kewenangan penugasan terhadap tingkatan di bawahnya.

Contohnya adalah penugasan dari Gubernur kepada Bupati atau Walikota kepada perangkat camat atau desa (Sinyo Harry Sarundajang, 2009).

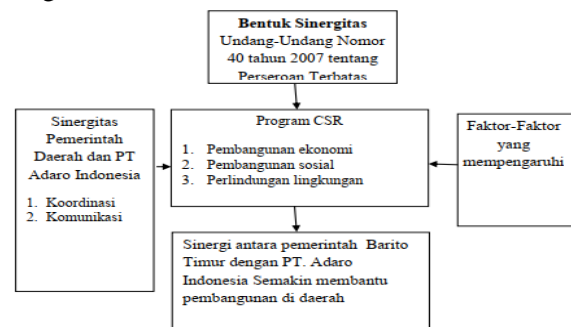
Tujuan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dianggap sudah sesuai dengan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum (Moenta Pangerang & Pradana Anugrah, 2017:23).

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan peningkatan kualitas kehidupan mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota masyarakat untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada, dan dapat menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidup termasuk perubahan-perubahan yang ada sekaligus memelihara. atau dengan kata lain merupakan cara

perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif dalam masyarakat (Bambang Rudito dan Melia Famiola, 2013:103).

Dalam penelitian ini menggunakan konsep sinergitas untuk menjawab permasalahan yang ada yakni sinergitas pemerintah Daerah dengan PT. Adaro Indonesia dengan menggunakan teori Mulyana (2018) bahwa bentuk dari sinergitas yakni koordinasi dan komunikasi.

Berdasarkan beberapa teori dalam penelitian ini dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penyajian data secara deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan narasumber. Penelitian ini membutuhkan peran peneliti untuk observasi langsung ke lapangan dan melakukan penelitian lapangan (field research) untuk memperoleh data dan informasi serta mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini juga menggunakan paradigma rasionalistik, dimana hasil dari pengamatan, pengalaman dan pengukuran pada karakter fisik lingkungan terbangun maupun kondisi nonfisik kegiatan masyarakat di lokasi penelitian guna mengidentifikasi dan menganalisis temuan data, membahas hasil analisis, menarik kesimpulan, dan menentukan langkah rekomendasi.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena memandang pendekatan ini dapat membawa peneliti untuk memahami dan menjelaskan realitas sosial yang ditemukan dalam proses penelitian. Pendekatan ini dianggap tepat untuk mendapatkan pemahaman secara holistik dan alamiah melalui proses wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penelitian ini berupaya menggambarkan realitas yang terjadi. Disini, peneliti akan mengkaji mengenai sinergitas pemerintah daerah dan PT. Adaro

Indonesia dalam pelaksanaan program CSR di Kabupaten Barito Timur.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Artinya, penulis menganalisis dan menggambarkan hasil penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat. Secara teoritis, penelitian deskriptif adalah penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta dengan menganalisis data.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada di Kabupaten Barito Timur dengan objek penelitian adalah pemerintah daerah dan PT. Adaro Indonesia.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data penelitian. Pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan observasi. Dengan demikian, maka data primer penelitian adalah informan pada saat wawancara penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Data tersebut berupa buku, literature, jurnal, laporan-laporan, surat kabar offline dan online, hasil penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Informan

Peneliti menentukan informan dengan menggunakan mekanisme penentuan informan dengan disengaja (*purposive sampling*). Sesuai dengan kriteria di atas maka penulis memilih informan sebagai berikut:

- a. Pihak Bappeda Kabupaten Barito Timur yang terlibat pelaksanaan program CSR Kabupaten Barito Timur
- b. Manager atau pihak yang terlibat pelaksanaan CSR PT. Adaro Indonesia wilayah Barito Timur
- c. Beberapa masyarakat yang terdampak CSR PT. Adaro Indonesia

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Dalam penelitian

kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri. Peneliti kualitatif sebagai human instrumen, berfungsi menentukan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, mengkaji dan menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya. Instrumen yang akan digunakan oleh peneliti yaitu; pedoman observasi, pedoman wawancara, dan catatan dokumentasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Berikut adalah beberapa cara yang peneliti lakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis dan sikap serta tindakan atau gerak manusiawi yang kemudian dilakukan pencatatan. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

Observasi ini dilakukan dengan mengamati kegiatan promosi dan kegiatan-kegiatan lain pada Dinas Pariwisata Kabupaten Balangan, yang meliputi berbagai agenda kegiatan yang telah dijadwalkan dinas pariwisata. Pengamatan ini dilakukan selama kunjungan dan tidak hanya sekali, tetapi dilakukan selama pengumpulan data berlangsung. Pengamatan ini juga dilakukan untuk mengamati berbagai hal yang ditemui di lingkungan perusahaan maupun lingkup pemerintah daerah.

b. Wawancara

Dalam kaitannya dengan penelitian ini penulis memilih melakukan metode wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*) yaitu wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengar secara langsung informasi-informasi atau keterangan yang diteliti. Bagaimana merumuskan untuk percakapan dua pihak, antara orang yang mewawancarai dan orang yang diwawancarai untuk pengumpulan data yang diperlukan. Dalam hal ini peneliti mengadakan wawancara dengan dengan informan terkait dengan sinergitas pemerintah daerah dan PT. Adaro Indonesia dalam pelaksanaan program CSR di Kabupaten Barito Timur. Dalam melakukan wawancara, peneliti bebas mengembangkan tentang fokus penelitian secara mendalam kepada informan yang dianggap mengetahui apa yang dijadikan fokus penelitian. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan keaslian data permasalahan secara terbuka.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara pengumpulan data-data sekunder yang diperoleh dari informan. Metode ini dilakukan dengan cara melihat dan mempelajari dokumen-dokumen serta mencatat data tertulis yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. Adapun studi dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Gambar sebagai proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun seperti foto, gambar hidup, sketsa, dan lainnya.
- 2) Sumber data tertulis yaitu sumber resmi dan tak resmi.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa data kualitatif. Dengan tujuan memberikan gambaran secara lengkap aktual, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Gambaran tersebut didapat dari hasil pengumpulan data baik dengan observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Hasil tersebut kemudian dijabarkan dan dimasukkan ke dalam pola penelitian dan teori-teori yang digunakan dalam penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan dari

penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pada tahap ini dilakukan pemilihan tentang relevan tidaknya antara data dengan tujuan penelitian. Informasi dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, serta ditonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan. Mereduksi data berarti mempertegas, merangkum, memilih hal-hal yang pokok, serta memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai pola dan temanya. Dalam mereduksi data, peneliti mengacu pada tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama penelitian kualitatif yaitu temuan di lapangan mengenai sinergitas pemerintah daerah dan PT. Adaro Indonesia dalam menunjang pelaksanaan program CSR di Kabupaten Barito Timur.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, grafik, matrik, *network* dan *chart*. Selain itu, dalam penyajian data juga dilakukan kategorisasi, yaitu memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Pada tahap ini juga peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah langkah ketiga dalam analisis data yang berusaha mencari data yang dikumpulkan, kemudian mencari pola, tema hubungan, permasalahan hal-hal yang sering muncul dan sebagainya. Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan diawal, namun tidak menutup kemungkinan juga tidak menjawab rumusan masalah. Hal ini karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih

bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berup hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

7. Keabsahan Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi sumber data yaitu penulis membandingkan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pihak perusahaan. Selanjutnya penulis juga membandingkan jawaban informan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Untuk mencapai kepercayaan itu, maka penulis kemudian melakukan observasi lapangan untuk menguji kebenaran informasi yang disampaikan oleh informan dengan cara mengunjungi langsung lokasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

1.1 Sinergitas Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur dengan PT. Adaro Indonesia dalam pelaksanaan program CSR.

Ekonomi merupakan motif awal dari tujuan CSR untuk menghasilkan barang dan juga jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya akan mengarah kepada tanggung jawab legal dimana semua peraturan yang diberlakukan di tempat perusahaan beroperasi akan dipatuhi oleh perusahaan. Kemudian perusahaan akan bertanggung jawab secara moral atau etika dengan mewujudkan standar, norma dan keinginan untuk kepentingan konsumen, pegawai, pemegang saham dan masyarakat secara adil, serta selalu menjaga dengan hormat atas perlindungan terhadap hak moral stakeholder. Yang terakhir adalah tanggung jawab filantropi, berupa tindakan pihak perusahaan dalam menanggapi semua harapan masyarakat terhadap perusahaan yang memiliki citra baik bagi masyarakat. Tindakan ini dapat berupa sumbangan perusahaan berupa dana, barang, maupun jasa kepada masyarakat, dan kesukarelaan perusahaan untuk mengerahkan sumber daya organisasi dalam menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan pengaturan pemerintah.

Selanjutnya, untuk mengetahui sejauh mana sinergitas pemerintah daerah dan PT. Adaro Indonesia dalam pelaksanaan program CSR di Kabupaten Barito Timur dapat diuraikan dengan mengacu pada pendapat Mulyana bahwa sinergitas program dilakukan melalui proses koordinasi dan komunikasi sebagai berikut:

a. Koordinasi

Bagian koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Bappeda Panahan Moetar, SE.M.Si mengatakan bahwa:

“Bentuk koordinasi Pemerintah Daerah dan PT. Adaro Indonesia dalam pelaksanaan program CSR baik dalam bidang ekonomi, sosial dan lingkungan di Kabupaten Barito Timur sangat luar biasa. Ada meeting bersama yang dilakukan dengan pihak Adaro. Banyak program yang disinergikan utamanya dalam bidang ekonomi. Kami telah melakukan perumusan dan koordinasi bersama dengan pihak Adaro, terkait apa yang mereka programkan, dan apa yang bisa pemerintah usulkan”. (Hasil wawancara pada tanggal 28 Mei 2022).

Wawancara lebih lanjut dengan dengan Perwakilan CSR PT. Adaro Indonesia mengungkapkan bahwa:

“Secara teknis Adaro telah membangun koordinasi dengan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Kami telah melakukan perumusan dan koordinasi bersama dengan pihak pemerintah, terkait apa yang Adaro programkan dan apa yang bisa pemerintah usulkan. Hasilnya kemudian disampaikan ke Dewan Pengawas CSR adaro di Jakarta. Jika ada usulan dari pemerintah tidak sesuai kami diminta untuk mengkomunikasikannya kembali”. (Hasil wawancara pada tanggal 20 Mei 2022).

Berdasarkan hasil uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan koordinasi pemerintah daerah dan PT. Adaro Indonesia dalam pelaksanaan program CSR meliputi program pembangunan dalam bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Proses koordinasi dilakukan melalui pertemuan untuk melakukan pembahasan program berdasarkan hasil pendataan dan daftar usulan yang ada. Adapun

hasil-hasil koordinasi tersebut telah menetapkan beberapa program diantaranya adalah pembinaan UMKM mereka dilatih bikin packaging, branding, permodalan dan akses internet. Selanjutnya adalah bina desa seperti pembinaan pembinaan Bumdes, pembinaan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, infrastruktur dan ekonomi. Sedangkan untuk program pembangunan bidang lingkungan adalah sekolah adiwiyata, bank sampah dan kampung iklim.

b. Komunikasi

Komunikasi antara pemerintah Daerah dengan PT. Adaro merupakan salah satu bentuk komunikasi lintas sektoral. Meskipun demikian, arus penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan sifat dan hubungan yang saling tergantung satu sama lain. Pesan yang disampaikan dan yang diterima bukan saja berupa informasi, melainkan juga penyebaran ide-ide (*sharing ideas*), yang berhubungan dengan tindakan dan kebijakan pemerintah. Berkaitan dengan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Daerah dengan PT. Adaro Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bappeda Panahan Moetar, SE.M.Si bahwa:

“Komunikasi Pemerintah Daerah dan PT. Adaro Indonesia dalam pelaksanaan program CSR baik dalam bidang ekonomi, sosial dan lingkungan di Kabupaten Barito Timur seperti contoh bantuan penanganan covid 19 sebagaimana pernyataan kami sebelumnya bahwa sudah ada tim CSR yang dibentuk. Selanjutnya tim inilah yang kemudian melakukan komunikasi dengan pihak Adaro. Disini kita duduk bersama untuk melakukan sinkronisasi program seperti misalnya program dalam bidang ekonomi yaitu peningkatan jumlah UMKM Barito Timur, program pembangunan bidang sosial berupa Bantuan Bina desa, Rehab Rumah Ibadah, pengadaan sarana olah raga dll. Sedangkan untuk program pembangunan bidang lingkungan sekolah adiwiyata, bank sampah dan kampung iklim”. (Hasil wawancara padatangal 28 Mei 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Perwakilan CSR PT. Adaro Indonesia Lenny Marlina mengatakan:

“Salah satu bentuk komunikasi yang kami lakukan dengan pemerintah daerah adalah dengan dibentuknya tim sinkronisasi dan koordinasi untuk program CSR di Barito Timur dari hasil komunikasi dan sinkronisasi yang dilakukan misalnya dalam bidang ekonomi adalah peningkatan jumlah UMKM hingga 10 ribu di Barito Timur, program pelatihan UMKM, dan akses internet bagi UMKM. Komunikasi dan sinkronisasi ini dilakukan setiap awal penentuan program CSR di tahun berikutnya. Selain itu di setiap waktu yang membutuhkan koordinasi akan dilakukan”. (Hasil wawancara pada tanggal 20 Mei 2022).

Hasil wawancara diatas dapat diartikan bahwa PT. Adaro Indonesia sudah menjalankan hubungan yang baik dengan pemerintah Daerah. Hal tersebut didukung dengan adanya tim sinkronisasi dan koordinasi program CSR yang telah dibentuk oleh oleh PT. Adaro Indonesia. Tim tersebut betugas untuk menyusun program yang selanjutnya diusulkan kepada Pemerintah Daerah.

1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi sinergitas Pemerintah Daerah dan PT. Adaro Indonesia dalam pelaksanaan program CSR di Kabupaten Barito Timur.

Sinergitas Pemerintah Daerah dan PT. Adaro Indonesia dalam pelaksanaan program CSR di Kabupaten Barito Timur, ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi sinergitas tersebut yaitu:

a. Karakteristik Wilayah

Beragamnya kondisi desa-desa yang menjadi wilayah pemberdayaan PT. Adaro Indonesia, seringkali memunculkan banyaknya variasi usulan kegiatan dari masyarakat. Variasi usulan kegiatan tersebut membuat perumusan rencana kegiatan yang dilakukan oleh PT. Adaro Indonesia menjadi rumit. Proses verifikasi dan penilaian kelayakan usulan program membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak. Dengan hanya ditetapkan 34 desa dari 122 desa dan 9 kelurahan yang ada di Kabupaten Barito Timur, seringkali usulan program yang disampaikan oleh masyarakat di luar desa yang menjadi wilayah pemberdayaan tidak dapat diakomodir oleh PT. Adaro Indonesia. Hal ini sering menimbulkan

komplain dari masyarakat yang tidak terakomodir usulannya tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Firmansyah:

“Salah satu kendala yang sering kita temui adalah adanya usulan masyarakat dari desa-desa di luar wilayah pemberdayaan Adaro sehingga mereka merasa kecewa karena permohonannya tidak dapat dipenuhi. Mereka ingin agar permintaannya bisa dipenuhi juga”. (Wawancara pada tanggal 3 April 2022)

Pemerataan pembangunan menjadi sangat penting dalam suatu wilayah namun dari hasil koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur hanya mampu mengakomodir 34 desa dari total 122 desa dan 9 kelurahan. Pihak PT. Adaro Indonesia menganggarkan beberapa desa sebagai sasaran pembangunan berdasarkan hasil pemetaan dan usulan dari masyarakat yang selanjutnya dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.

b. Karakteristik Masyarakat

Karakteristik masyarakat dalam suatu wilayah memiliki beragam pandangan dan pengetahuan tentang program pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun swasta. Tidak semua masyarakat yang menerima alokasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dari PT. Adaro Indonesia mampu melaksanakan program pembangunan baik dalam bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dan senantiasa menjadi pembahasan dalam proses konsultasi program pengembangan antara PT. Adaro Indonesia dan pemerintah daerah. Section Head CSR mengungkapkan bisa saja alokasi yang sudah ditetapkan tidak diterima oleh masyarakat.

“Bisa saja ada daerah menerima alokasi anggaran yang sudah ditetapkan. Seperti misalnya beberapa tahun yang lalu ada 1 (satu) kelurahan di Kabupaten Barito Timur yang tidak bersedia menjalankan program CSR yang sudah dialokasikan kepada mereka. Ini terjadi pada program Bina Desa”. (Wawancara pada tanggal 3 April 2022).

Guna menunjang pelaksanaan program pembangunan secara berkelanjutan maka sinergitas antara semua pihak menjadi sangat

penting, tidak hanya antara pemerintah Daerah dengan pihak swasta tetapi juga dengan masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat sebagai penerima manfaat dari hasil pembangunan perlu dilakukan oleh pemerintah daerah melalui sosialisasi serta melibatkan masyarakat mulai dari proses perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan.

c. Partisipasi Masyarakat

Adanya harapan yang besar dari masyarakat untuk terlibat dalam perumusan rencana program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat PT. Adaro Indonesia Indonesia sering kali membuat hasil dari pembahasan dengan Tim Koordinasi dan Konsultasi yang dibentuk oleh pemerintah daerah mendapat sorotan dari masyarakat. Tidak adanya pelibatan komponen masyarakat di dalam proses konsultasi yang dilakukan oleh PT. Adaro Indonesia kepada pemerintah daerah terkait rencana program pengembangan seringkali menjadi salah satu hambatan pelaksanaan program dilapangan. Mereka merasa seharusnya konsultasi rencana program CSR PT. Adaro Indonesia melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk LSM. Firmansyah Section Head CSR mengungkapkan bahwa:

“Dalam proses koordinasi dan komunikasi yang dilakukan antara pemerintah daerah dan PT. Adaro Indonesia memang tidak ada pelibatan dari masyarakat tetapi sebelum program itu dikoordinasikan Pihak Adaro telah melakukan pemetaan lapangan sekaligus menjaring aspirasi dari masyarakat.”. (Wawancara pada tanggal 3 April 2022).

Program CSR dapat berjalan dengan baik apabila pemerintah bersama dengan masyarakat saling mendukung. Kepedulian pemerintah menjadi unit penting dalam pembangunan sebagai alat memfasilitasi segala kegiatan atau program utamanya pemerintah Desa/Kelurahan untuk mendorong dan melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan, hal ini dapat menjadi faktor pendorong dalam mempercepat perkembangan pembangunan. Menurut Kepala Bappeda Panahan Moetar, S.E.M.Si mengatakan bahwa:

“Masyarakat memang tidak dilibatkan dalam proses koordinasi dan konsultasi program yang dilakukan oleh Pemerintah

Daerah bersama dengan PT. Adaro Indonesia. Tetapi baik pemerintah daerah maupun PT. Adaro Indonesia sejak awal sudah melakukan pendataan lapangan. Dari pemerintah daerah sendiri sudah memiliki daftar perencanaan pembangunan diperoleh dari hasil musembang. Nah dalam musrembang tersebutlah kemudian masyarakat dilibatkan untuk menyampaikan usulan program". (Hasil wawancara pada tanggal 28 Mei 2022).

Dasar tidak dilibatkannya masyarakat dalam proses koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur bersama dengan PT. Adaro Indonesia karena pihak PT. Adaro Indonesia telah melakukan pendataan lapangan untuk menjaring dan menampung aspirasi masyarakat yang akan dijadikan sebagai daftar usulan program sedangkan bagi pemerintah daerah mengacu pada hasil musyawarah pembangunan dari hasil-hasil tersebut dijadikan sebagai bahan untuk disinkronisasikan untuk ditetapkan sebagai program pemabngunan yang akan dilaksanakan.

2. Hasil Penelitian

2.1. Sinergitas Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur dengan PT. Adaro Indonesia dalam pelaksanaan program CSR.

a. Koordinasi

Koordinasi adalah salah satu system fungsi dari manajemen yang memegang peranan-peranan yang sama pentingnya dan juga beserta dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Pada dasarnya, setiap pihak yang terlibat dalam Koordinasi haruslah memiliki kesamaan persepsi mengenai tujuan yang akan di capai. Dengan demikian walaupun memiliki tugas dan fungsi serta tanggung jawab yang berbeda, baik Pemerintah Daerah maupun PT. Adaro Indonesia. Namun Koordinasi yang dilakukan oleh keduanya adalah dalam rangka saling melengkapi atau membantu agar tercapainya tujuan bersama. Olehkarna itu, pola koordinasi yang efektif memiliki indikator-indikator penting untuk menjadi acuan tercapainya tujuan bersama tersebut. Adapun beberapa hal yang menjadi tolak ukur koordinasi yang dilakukan kedua pihak adalah terkait dengan pelaksanaan

program CSR di Kabupaten Barito Timur yang ditinjau dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Koordinasi sangat di perlukan juga dalam manajemen, untuk menggabungkan persamaan pandangan diantara berbagai pihak-pihak yang berkepentingan duntuk mencapai tujuan bersama. Koordinasi dibutuhkan untuk menyambungkan bagian-bagian satu dengan bagian yang lainnya dan pada akhirnya tercipta suatu kegiatan-kegiatan yang terpadu mengarah pada satu tujuan umum. Salah satu upaya pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur untuk mempermudah proses koordinasi dengan pihak PT. Adaro Indonesi adalah dengan membentuk Tim Koordinasi dan Sinkronisasi (TKS) untuk mengakomodir perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan pemenuhan kewajibannya dalam mengkonsultasikan rencana program pengembangan dan pembangunan. Tim Koordinasi dan Sinkronisasi (TKS) merupakan tim perumus yang diketuai Sekda Barito Timur bersama dengan Kepala Bappeda Barito Timur selaku Sekretaris yang menjalankan fungsi manajemen Pemerintah Daerah baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program kerjasama dengan PT. Adaro Indonesi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian Penulis menemukan beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur untuk mengkoordinasi program CSR yang terjadi di wilayahnya. Sebagai langkah pertama, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur telah membentuk Tim Koordinasi dan Singkronisasi yang di ketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur. Melalui tim koordinasi dan sinkronisasi tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur mengharapkan adanya penyesuaian antara program CSR yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan rencana pembangunan daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur. Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur mengharapkan bahwa dengan adanya proses sinkronisasi akan dapat memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai kegiatan CSR yang ada. Termasuk hal-hal di dalamnya yang diinginkan oleh Pemerintah Daerah untuk kiranya bisa dikerjakan oleh

perusahaan melalui kegiatan CSR.

b. Komunikasi

Keberhasilan pembangunan berawal dari adanya komunikasi yang efektif. Beberapa peran penting komunikasi dalam pembangunan antara lain adalah sebagai transfer pengetahuan, meningkatkan aspirasi yang merupakan motivasi untuk bertindak nyata dan berpartisipasi dalam pembuatan setiap keputusan dalam kehidupan masyarakat. Komunikasi pemerintahan diwujudkan dalam bentuk penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat, perusahaan/kelompok maupun perseorangan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui TIM Koordinasi dan Singkronisasi berkedudukan sebagai komunikator (pemberi informasi) kepada pihak perusahaan PT. Adaro Indonesia sebagai komunikan (penerima informasi), atau bisa juga sebaliknya.

Komunikasi yang efektif akan menimbulkan keterbukaan, saling percaya dan mempercepat aliran informasi sehingga masing-masing pihak dapat mengetahui perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang benar sehingga hasilnya memuaskan semua pihak. Keterbukaan dapat menghilangkan praktek monopoli, mengurangi kolusi, korupsi dan nepotisme yang selama ini sangat merugikan masyarakat. Adanya keterbukaan akan menimbulkan partisipasi aktif aparat pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan koordinasi pengawasan pembangunan. Dengan demikian tujuan pembangunan dapat tepat sasaran, tidak salah arah dan tercapai lebih cepat serta lebih baik. Menurut Jannah, Darmi, and Rochmayanti 2018 bahwa Komunikasi efektif merupakan proses penyampaian informasi kepada seseorang melalui cara tertentu agar si penerima informasi tersebut mengerti dan tersampaikan dengan jelas.

2.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi sinergitas Pemerintah Daerah dan PT. Adaro Indonesia dalam pelaksanaan program CSR di Kabupaten Barito Timur

a. Karakteristik Wilayah

Fokus utama yang menjadi prioritas dalam pembangunan adalah usaha untuk mencapai

perbaikan ekonomi, yang tidak hanya terbatas pada golongan elite, tetapi juga secara menyeluruh dan merata sampai pada lapisan terbawah. Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan- kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut. Namun seringkali program pembangunan tersebut dianggap tidak sesuai dengan karakteristik wilayah tersebut.

Adanya kondisi tiap-tiap daerah yang berbeda menyebabkan strategi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah juga berbeda-beda. Perbedaan tersebut diakibatkan antara lain adanya perbedaan potensi sumberdaya dan aktivitas manusia serta pertumbuhan penduduk yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Agar pembangunan dapat berjalan dengan seimbang dan lancar maka pemerintah harus memperhatikan semua daerah tanpa ada perlakuan khusus bagi masing- masing daerah.

b. Karakteristik Masyarakat

Karakteristik masyarakat dalam suatu wilayah memiliki beragam pandangan dan pengetahuan tentang program pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun swasta. Tidak semua masyarakat yang menerima alokasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dari PT. Adaro Indonesia mampu melaksanakan program pembangunan baik dalam bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dan senantiasa menjadi pembahasan dalam proses konsultasi program pengembangan antara PT. Adaro Indonesia dan pemerintah daerah.

c. Partisipasi Masyarakat

Dalam konteks ini, masyarakat memiliki hak untuk memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka. Dengan demikian, rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, masyarakat perlu dibina dan dipersiapkan

untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan, menikmati produk yang dihasilkan serta melestarikan program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan.

Program CSR dapat berjalan dengan baik apabila pemerintah bersama dengan masyarakat saling mendukung. Kepedulian pemerintah menjadi unit penting dalam pembangunan sebagai alat memfasilitasi segala kegiatan atau program utamanya pemerintah Desa/Kelurahan untuk mendorong dan melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan, hal ini dapat menjadi faktor pendorong dalam mempercepat perkembangan pembangunan.

Dasar tidak dilibatkannya masyarakat dalam proses koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur bersama dengan PT. Adaro Indonesia karena pihak PT. Adaro Indonesia telah melakukan pendataan lapangan untuk menjangkau dan menampung aspirasi masyarakat yang akan dijadikan sebagai daftar usulan program sedangkan bagi pemerintah daerah mengacu pada hasil musyawarah pembangunan dari hasil-hasil tersebut dijadikan sebagai bahan untuk disinkronisasikan untuk ditetapkan sebagai program pembangunan yang akan dilaksanakan.

KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

- a. Sinergitas Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur dan PT. Adaro Indonesia dalam pelaksanaan program CSR dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi dan komunikasi. Pelaksanaan koordinasi pemerintah daerah dan PT. Adaro Indonesia dalam pelaksanaan program CSR meliputi program pembangunan dalam bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Proses koordinasi dilakukan melalui pertemuan untuk melakukan pembahasan program berdasarkan hasil pendataan dan daftar usulan yang ada. Adapun hasil-hasil koordinasi tersebut telah menetapkan beberapa program diantaranya adalah

pembinaan UMKM mereka dilatih bikin packaging, branding, permodalan dan akses internet. Selanjutnya adalah bina desa seperti pembinaan pembina Bumdes, pembinaan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, infrastruktur dan ekonomi. Sedangkan untuk program pembangunan bidang lingkungan adalah sekolah adiwiyata, bank sampah dan kampung iklim. Sedangkan untuk kegiatan komunikasi dilakukan melalui forum pertemuan bersama guna membahas beberapa program program CSR di Kabupaten Barito Timur baik program pembangunan bidang ekonomi, sosial dan lingkungan.

- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Sinergitas Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur dan PT. Adaro Indonesia dalam pelaksanaan program CSR

- 1) Karakteristik wilayah yakni adanya wilayah sasaran pembangunan yang tidak mampu diakomodir secara keseluruhan oleh PT. Adaro mengingat wilayah kabupaten Barito Timur yang cukup luas dengan jumlah desa sebanyak 122 desa dan 9 kelurahan sehingga PT. Adaro Indonesian hanya mampu mengakomodir 34 Desa sebagai sasaran pembangunan.

- 2) Karakteristik masyarakat yakni adanya wilayah penerima alokasi anggaran yang sudah ditetapkan yang tidak bersedia menjalankan program CSR sehingga pelaksanaan program tidak berjalan dengan maksimal.

- 3) Partisipasi masyarakat yakni dalam proses koordinasi dan komunikasi yang dilakukan antara pemerintah daerah dan PT. Adaro Indonesia tidak melibatkan masyarakat

2. Saran

Untuk meningkatkan sinergitas pemerintah daerah dengan PT. Adaro Indonesia dalam pelaksanaan program CSR di Kabupaten Barito Timur disarankan agar:

- a. Perlu dilakukan penelitian-penelitian tentang sinergitas Pemerintah Daerah dan PT. Adaro Indonesia dalam pelaksanaan program CSR di Kabupaten Barito Timur, sehingga dapat ditemukan sebuah

mekanisme konsultasi perencanaan program yang ideal, yang dapat diterapkan di seluruh Indonesia.

- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur sebaiknya menerbitkan suatu kebijakan khusus (perda/perbup/SK Bupati, dll) sebagai pedoman dan petunjuk teknis di tingkat kabupaten yang mewajibkan perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Barito Timur untuk mengkonsultasikan rencana program program CSR di Kabupaten Barito Timur.
- c. PT. Adaro Indonesia perlu mendorong dibentuknya sebuah forum CSR di tingkat kabupaten yang bisa memfasilitasi perusahaan dalam melakukan konsultasi rencana program CSR di Kabupaten Barito Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani Sri Rahayu, 2017. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Malang: Sinar Grafika
- Bambang Rudito dan Melia Famiola, 2013. *CSR (Corporate Sosial Responsibility)*, Bandung: Penerbit Rekayasa Sains
- Busyra Azheri, 2012. *Corporate Social Responsibility : Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta : Rajawali Pers
- Moenta Pangerang & Pradana Anugrah, 2017. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Makassar: PT Raja Grafindo Persada
- Sali Susiana, 2015. *Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi, Dan Lingkungan*, Jakarta: Diterbitkan P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika
- Sinyo Harry Sarundajang, 2009. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.